

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada bab ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Adapun data-data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian tersebut yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi dan wawancara untuk mengetahui evaluasi kebijakan perda tentang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Pembahasan ini akan difokuskan pada variabel dan indikator untuk melihat keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, sesuai dengan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

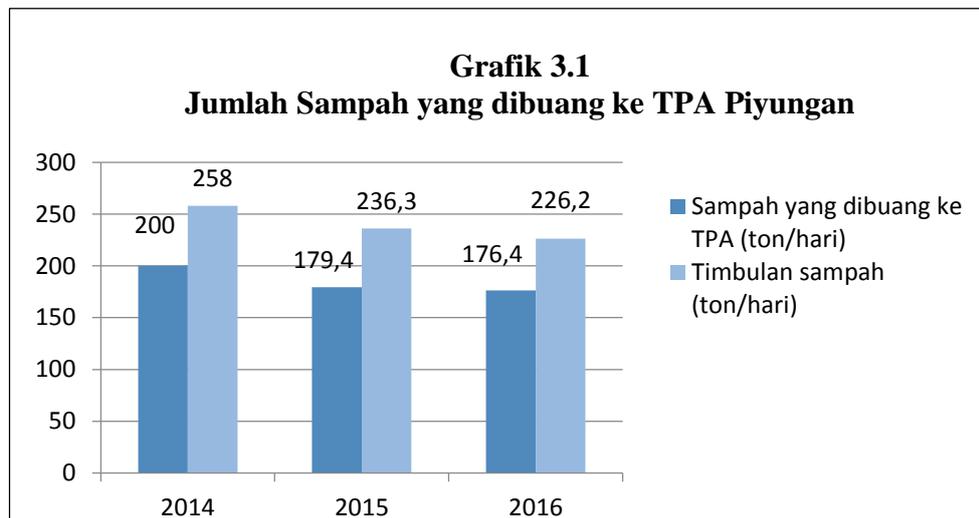
1.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan cerminan apakah hasil suatu kebijakan yang diinginkan telah tercapai. Yang mana kebijakan tersebut dapat tepat guna dan tepat manfaatnya.

1.1.1 Jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan

Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 huruf g menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah “mengurangi kuantitas sampah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah” hal

tersebut dapat diukur dari jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan setiap tahunnya.



Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Dari grafik di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah sampah yang dibuang ke TPA mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 200 ton/hari menjadi 176,4 ton/hari pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata timbulan sampah di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dari 259 ton/hari menjadi 226,2 ton/hari. Sesuai SNI yang dimaksud dengan timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Berdasarkan hasil perhitungan untuk tahun 2015 rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan adalah sebesar 5.382 ton/bulan atau rata-rata sebesar 179,4 ton/hari, setara dengan 75,92% dari timbulan sampah di Kota Yogyakarta.

Jumlah timbulan sampah untuk Kota Yogyakarta menggunakan Indeks dari SNI 19-3694-1994 untuk kota besar, yaitu 2-2,5 liter/orang/hari atau 0,4-0,5 kg/orang/hari. Perhitungan timbulan sampah dilakukan berdasarkan jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per Desember. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 410.886 jiwa, ditambah dengan asumsi penduduk siang hari yang membuang sampahnya di Kota Yogyakarta (pelajar, karyawan, wisatawan, pedagang) sebesar 15% sebesar 61.633 jiwa dikalikan dengan 0,5 berdasarkan indeks SNI 19-3694-1994 adalah 0,5 kg/orang/hari. Timbulan sampah tahun 2015 diperhitungkan sebesar 236,3 ton/hari. Sedangkan untuk tahun 2016 rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan adalah sebesar 176,4 ton/hari, setara dengan 77,98% dari timbulan sampah di Kota Yogyakarta. Timbulan sampah tahun 2016 diperhitungkan sebesar 226,2 ton/hari. Penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPA ini juga mengindikasikan bahwa timbulan sampah mulai dari sumber sampah yaitu rumah tangga tidak seluruhnya dibuang ke TPS, namun telah mengalami pemanfaatan sampah melalui bank sampah ataupun daur ulang sampah. Berikut merupakan target maksimal sampah yang dibuang ke TPA Piyungan:

Tabel 3.1
Jumlah Maksimal Sampah yang dibuang
ke TPA Piyungan (ton/hari)

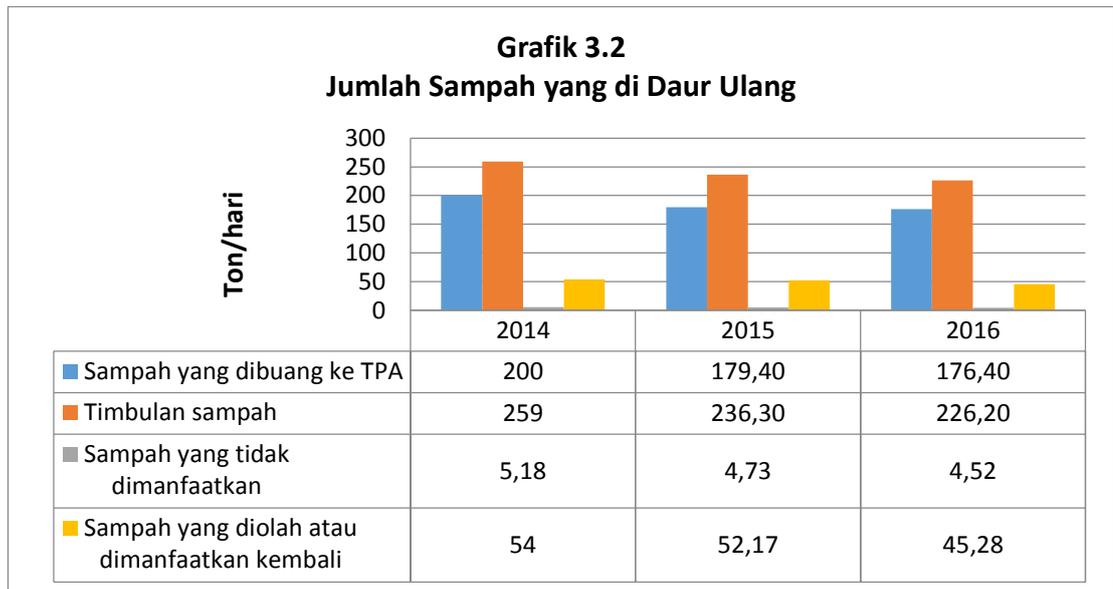
Tahun	Target	Realisasi
2014	159,7	200
2015	154,9	179,4
2016	150,2	176,4

Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dibuang ke TPA piyungan mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi jumlah tersebut melebihi target sampah yang dibuang. Pada tahun 2014 target sampah yang dibuang ke TPA adalah 159,7 ton/hari tetapi sampah yang dibuang berjumlah 200 ton/hari, jumlah tersebut melebihi target. Realisasi pada tahun 2014 hanya mencapai 79,85% saja. Pada tahun 2015 target sampah yang dibuang ke TPA adalah 154,9 ton/hari sedangkan sampah yang dibuang berjumlah 179,4 ton/hari turun 20,6 ton/hari dari tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun 2015 hanya mencapai 86,34%. Pada tahun 2016 target sampah yang dibuang ke TPA adalah 150,2 ton/hari tetapi sampah yang dibuang berjumlah 176,4 ton/hari, jumlah tersebut melebihi target. Realisasi pada tahun 2016 hanya mencapai 85,15% saja. Seharusnya jumlah sampah yang dibuang ke TPA sesuai target yang telah ditetapkan untuk menunjukkan keberhasilan indikator penurunan jumlah sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif berdasarkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

3.1.1.2 Jumlah sampah yang diolah kembali

Sesuai Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 pengurangan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.



Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2014 berjumlah 259 sedangkan 200 ton/hari dibuang ke TPA. Sisa timbulan sampah tersebut ada yang diolah oleh masyarakat dan ada yang tidak. Sekitar 54 ton/hari sampah dimanfaatkan kembali dan sisanya tidak dimanfaatkan. Jumlah timbulan sampah yang pada tahun 2015 berjumlah 236,30 sedangkan 179,40 ton/hari dibuang ke TPA. Sekitar 52,17 ton/hari sampah dimanfaatkan kembali, jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2016 berjumlah 226,2 sedangkan 176,4 ton/hari dibuang ke TPA. Sekitar 45,28 ton/hari sampah dimanfaatkan kembali, jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 52,17 ton/hari.

Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 huruf c dan d menyebutkan bahwa diantaranya tujuan pengelolaan sampah adalah “menjadikan sampah sebagai sumber daya”. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan inovasi dan penggunaan teknologi dalam rangka penanganan sampah melalui alat yang diberi nama bio-digester. DLH mendapatkan bantuan berupa alat pengelolaan sampah organik hasil kerjasama dengan lembaga internasional GIZ dari Jerman. Bio-digester hanya terdapat di dua tempat di Kota Yogyakarta, yaitu di kantor DLH dan Kecamatan Suryatmajan.

Penggunaan bio-digester dilakukan di Kecamatan Suryatmajan sejak tahun 2014. Pada saat peneliti mengunjungi lokasi alat bio-digester, alat tersebut sedang rusak semenjak 6 bulan lalu. Metode yang digunakan pada alat tersebut adalah fermentasi alami dengan bantuan campuran kotoran sapi dan bakteri sampah organik yang ada pada sampah rumah tangga seperti sisa makanan dan buah yang dimasukkan ke ruang sampah lalu diproses menjadi gas. Satu unit alat pembuat biogas bisa menampung 20 kg sampah organik. Bio-digester digunakan sebagai pengganti gas untuk keperluan memasak ini dikelola oleh salah satu warga yang bersedia mengelola alat pembuat biogas. Penggunaan biogas hanya digunakan warga yang mengelola biogas saja dikarenakan hanya memiliki satu saluran. Pada awalnya pemerintah dan pihak Jerman kesulitan mendapatkan tempat untuk bio-digester dikarenakan ada masyarakat yang tidak bersedia dan sempitnya lahan. Berdasarkan hasil wawancara pengelola bio-digester, Ibu Hestu. Pada tanggal 22 Oktober 2017, pukul 10.00 di Kecamatan Suryatmajan :

“dulu alat sudah di tempatin di Brontokusuman, tapi warga disana ga mau soalnya bau ada 50kg kotoran sapi. Suyatmajan hanya pilihan kedua, di cari warga yang bersedia di tempatkan dan mau ngelola. Makanya jadi di letakin disini alatnya”

Gambar 3.1
Bio-digester di Kecamatan Suryatmajan RW 4



Sumber : Foto Pribadi

. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah terkait pengurangan sampah adalah menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Berikut target dan realisasi terhadap pengurangan sampah dengan cara di manfaatkan kembali di Kota Yogyakarta :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Sampah yang Dikelola

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Presentase Realisasi
Presentase volume sampah yang dikelola secara 3R	2014	24%	20,78%	86,58%
	2015	27%	22,08%	86,58%
	2016	30%	20,02%	66,73%

Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa target yang ditetapkan DLH pada presentase volume sampah yang dikelola secara 3R mengalami kenaikan sebesar 3% pada tiap tahunnya. DLH menetapkan target 24 % pada tahun 2014 dan realisasinya hanya 20,78%. Tahun 2015 target naik 3% menjadi 27%, realisasinya hanya 22,08% dengan presentase realisasi 86,58%. Tetapi pada tahun 2016 presentase realisasi menurun dari 86,58% menjadi 66,73%. Dalam hal pengelolaan kembali sampah menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah mulai menurun dan konsep 3R (*reuse, replace, recycle*) belum diterapkan secara maksimal.

3.1.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan serta seberapa besar biaya dan energi yang dikeluarkan.

3.1.2.1 Tenaga kerja pelayanan kebersihan

Layanan kebersihan kota diukur dari persentase penggal jalan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta yang telah tertangani kebersihannya dengan penyapuan jalan. Berikut merupakan jumlah petugas pelayanan kebersihan yang ditugaskan di beberapa sektor Kota Yogyakarta :

Tabel 3.3
Jumlah Petugas Kebersihan Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Petugas Kebersihan
1.	Malioboro	11 orang
2.	Kranggan	7 orang
3.	Krasak	10 orang
4.	Gunungketur	12 orang
5.	Ngasem	9 orang
6.	Gading	7 orang
7.	Tungkak	10 orang
8.	Kotagede	6 orang
Jumlah		82 orang

Sumber : Data DLH Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas ada sekitar 82 orang petugas yang bertanggung jawab untuk menyapu jalan di sekitar Kota Yogyakarta sesuai sektor. Total penggal jalan di Kota Yogyakarta berjumlah 556 penggal jalan. Petugas paling banyak berada di sektor malioboro, karena malioboro merupakan pusat pariwisata Kota

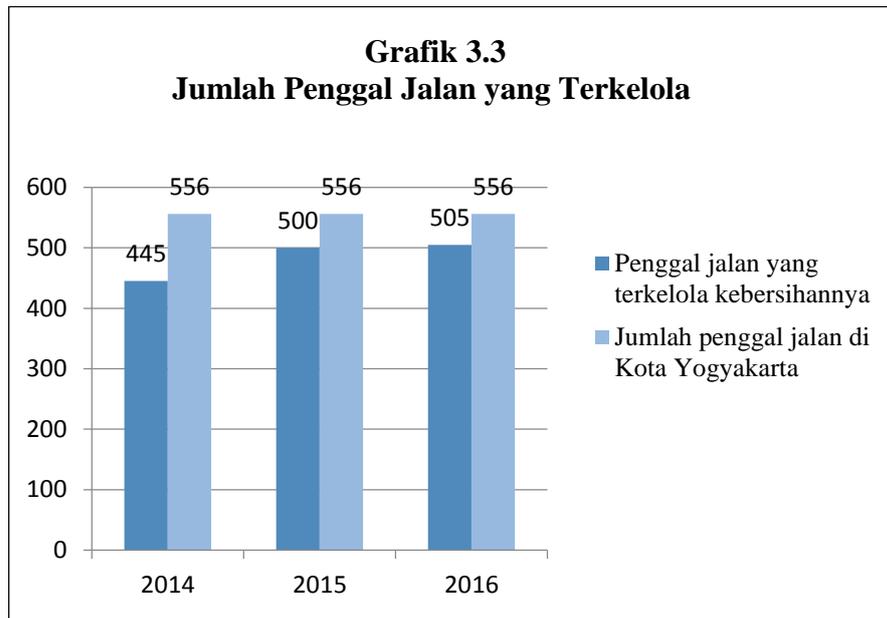
Yogyakarta. Berikut merupakan target layanan kebersihan kota dari tahun 2014-2016 di Kota Yogyakarta :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Layanan Kebersihan Kota

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Presentase Realisasi
Presentase layanan kebersihan kota	2014	80%	97,8%	122,2%
	2015	90%	89,61%	99,57%
	2016	100%	90,83%	90,83%

Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Semakin meningkat presentase penggal jalan yang telah terlayani penyapuan menandakan bahwa indikator tersebut berhasil. Berdasarkan tabel di atas, target yang ditetapkan semakin meningkat sebesar 10% tetapi realisasi nya tidak mencapai target pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan adalah 80% dan realisasi yang dicapai sebesar 97,8% artinya ditargetkan sekitar 445 penggal jalan dari total 556 penggal jalan dan di realisasikan 445 penggal jalan yang sudah terkelola kebersihannya. Untuk tahun 2015 ditargetkan 90% atau 500 penggal jalan untuk dikelola kebersihannya dan direalisasikan 89,61% atau 500 penggal jalan dari total 556 penggal jalan. Sedangkan untuk tahun 2016 targetnya sebesar 100% yang artinya harus mencapai total keseluruhan penggal jalan yaitu 556, tetapi realisasinya hanya mencapai 90,83% atau 505 penggal jalan yang sudah terkelola kebersihannya. Berikut merupakan grafik penggal jalan yang sudah terkelola kebersihannya :



Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

3.1.2.2 Anggaran pengelolaan sampah

Sesuai Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 Pasal 28 ayat 1 “Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah”. Untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah, DLH memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berikut merupakan anggaran untuk pengelolaan sampah :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2015

	Anggaran			Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Realisasi		Target	Realisasi	% Realisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9.537.455.560	8.615.065	90,33 %	Presentase Volume sampah yang terangkut ke TPA	78%	75,92%	97,33%
				Presentase volume sampah yang dikelola secara 3R	27%	22,08%	81,78%
				Presentase layanan kebersihan kota	90%	89,61%	99,57%

Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas anggaran yang digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.615.065 dari total target anggaran sebesar Rp. 9.537.455.560 presentase realisasi anggaran yang di serap adalah 90,33%. Kinerja pada tahun tersebut untuk indikator pertama yaitu presentase volume sampah yang terangkut ke TPA menunjukkan realisasi yang cukup tinggi yaitu 97,33%. Indikator kinerja kedua menunjukkan presentase realisasi yang rendah dibanding indikator kinerja pengelolaan sampah lainnya yaitu sebesar 81,78% untuk presentase volume sampah yang dikelola secara 3R. Indikator kinerja terakhir yaitu presentase layanan kebersihan kota menunjukkan presentase realisasi sebesar 99,57%. Secara umum anggaran yang

digunakan cukup efisien dilihat dari presentase realisasi kinerja yang lebih besar dibandingkan presentase anggaran yang diserap.

3.1.3 Kecukupan

Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil yang ingin dicapai dan seberapa jauh dapat memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan.

3.1.3.1 Sarana dan prasarana untuk pengurangan volume sampah

Dengan tersedianya fasilitas diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA hal ini sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 pasal 9 huruf d “melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”. Tetapi kenyataannya fasilitas yang disediakan belum bisa mengurangi volume sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub Pengurangan Sampah, Bapak Haryoko. Pada tanggal 20 September 2017 pukul 09.00. di kantor DLH Kota Yogyakarta:

“Dengan adanya fasilitas yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah sampah hal ini karena kurangnya peran serta dari masyarakat. Misalnya saja pemerintah memfasilitasi bank sampah tetapi nasabahnya sedikit. Oleh karena itu kita selalu sosialisasi dan evaluasi karena masyarakatnya belum ada kesadaran”

Peran masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah terutama bank sampah yang berbasis masyarakat. Sarana dan prasarana fisik bank sampah yang diberikan biasanya berupa timbangan, buku admin dan tas pilah. Bantuan tersebut hanya diberikan untuk bank sampah yang nasabahnya aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sub Pengurangan Sampah, Bapak Tomo.

Pada tanggal 6 November 2017 pukul 13.33. di kantor DLH Kota Yogyakarta:

“DLH tidak akan memberikan bantuan kalau warganya tidak bergerak aktif dalam pengelolaan bank sampah. Mereka harus menjalankan bank sampah secara mandiri dulu agar lebih menghargai bantuan sarana dan prasarana dari DLH nantinya”

Apabila bank sampah tidak bisa mengelola secara mandiri terlebih dahulu, DLH tidak akan memberikan bantuan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu mengelola secara mandiri dan jika bank sampah sudah beroperasi aktif DLH akan memberikan bantuan kekurangan sarana dan prasarana di bank sampah tersebut.

3.1.3.2 Teknik operasional pengelolaan sampah

Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 pasal 10 menyebutkan salah satu wewenang pemerintah daerah adalah “menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Teknik operasional pengelolaan sampah yang digunakan di Kota Yogyakarta sesuai dengan SNI-19-2454-2002. Dimulai dari pewadahan/ penampungan yang merupakan proses awal sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, di angkut dan dibuang ke TPA. Yang kedua adalah pengumpulan sampah yaitu proses pengambilan sampah mulai dari penampungan sampai ke tempat pembuangan sementara. Yang ketiga adalah proses pemindahan sampah ke dalam alat pengangkut sampah. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindah sampah. Keempat adalah pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan. Terakhir adalah pembuangan sampah ke TPA.

Kendala paling banyak di alami yaitu ketika di TPS, karena masyarakat tidak tertib ketika membuang sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub Pengurangan Sampah, Bapak Haryoko. Pada tanggal 20 September 2017 pukul 09.00. di kantor DLH Kota Yogyakarta:

“masyarakat masih banyak yang membuang sampah tidak dimasukkan di dalam TPS hingga berserakan disekitar luar TPS, itu menyebabkan sekitaran TPS menjadi bau. Biasanya DLH selalu membersihkan dan mencuci bagian dalam TPS setiap sebulan sekali kalau bagian luar tidak bisa dicuci. Bagian dalam TPS kan ada sumur resapan air jadi setiap dicuci masuknya kesana”

Teknik operasional pengelolaan sampah di TPA Kota Yogyakarta yaitu menggunakan sistem *control landfill*. Sistem *controll landfill* adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pelapisan tanah penutup paling tidak dikerjakan setiap tujuh hari.

Kendala yang dihadapi saat di TPA salah satunya adalah jembatan penimbang yang sering mengalami kerusakan. Pihak yang paling dirugikan adalah TPA itu sendiri, karena pada dasarnya ukuran timbangan akan digunakan untuk pembiayaan TPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub Pengurangan Sampah, Bapak Haryoko. Pada tanggal 20 September 2017 pukul 09.00. di kantor DLH Kota Yogyakarta:

“Kalau tidak ada timbangan perhitungannya berdasarkan asumsi, ini hasil hitungan timbangan digunakan sebagai dasar *sharing operasional* untuk pembiayaan TPA Piyungan”

3.1.4 Pemerataan

Pemerataan berguna untuk melihat apakah biaya dan manfaat yang telah di distribusikan dilakukan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

3.1.4.1 Sarana dan prasarana penanganan sampah di tiap kecamatan

Penyediaan sarana dan prasarana belum merata di setiap kecamatan dikarenakan kurangnya TPS. Hal ini dikarenakan kurang tersedianya lahan yang akan dijadikan TPS dan masyarakat banyak yang kurang setuju apabila TPS ditempatkan di sekitar rumah mereka dengan alasan mengganggu kenyamanan. Sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa penetapan lokasi TPS/TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan kepentingan umum dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dalam menambah jumlah TPS. Bagi pemerintah khususnya DLH apabila ada pengurangan TPS dapat mempermudah pengangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub Pengurangan Sampah, Bapak Haryoko. Pada tanggal 20 September 2017 pukul 09.00. di kantor DLH Kota Yogyakarta:

“Keuntungannya apabila ada lahan yang luas dan bisa menepatkan armada 24 jam itu bisa efisien karena tidak banyak jalur untuk mengangkut sampah”

Berikut merupakan pelayanan akses persampahan secara fisik di Kota Yogyakarta :

Tabel 3.6
Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Landasan Container dan
Transfer Depo di Kota Yogyakarta 2017

No	Kecamatan	TPS		Landasan Container		Transfer Depo		Total Kapasitas (m ³)
		Jumlah	Kapasitas (m3)	Jumlah	Kapasitas (m3)	Jumlah	Kapasitas (m3)	
1	Kecamatan Mantriweron	-	-	1	6	1	20	26
2	Kecamatan Kraton	4	8	-	-	1	12	20
3	Kecamatan Mergangsan	3	14	-	-	1	40	54
4	Kecamatan Umbulharjo	6	20	3	18	2	32	70
5	Kecamatan Kotagede	-	-	2	30	2	40	70
6	Kecamatan Gondokusuman	32	79	2	24	2	66	169
7	Kecamatan Danurejan	6	36	2	12	-	-	48
8	Kecamatan Pakualaman	1	6	1	6	-	-	12
9	Kecamatan Gondomanan	6	23	1	6	-	-	29
10	Kecamatan Ngampilan	1	20	-	-	-	-	20
11	Kecamatan Wirobrajan	1	2	2	36	-	-	38
12	Kecamatan Gedongtengen	3	14	1	4	1	28	46
13	Kecamatan Jetis	2	32	-	-	-	-	32
14	Kecamatan Tegalrejo	6	72	2	12	1	12	96
Jumlah		75	326	17	154	11	250	730

Sumber : Data DLH Yogyakarta

3.1.4.2 Pelayanan pengangkutan sampah di tiap kecamatan

Pengangkutan sampah dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah, oleh karena itu DLH melakukan pelayanan pengangkutan sampah yang menjangkau tiap-tiap TPS menuju TPA Piyungan menggunakan truk sampah. Berikut merupakan sarana dan prasarana penanganan sampah di Kota Yogyakarta :

Tabel 3.7
Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Gerobak sampah	54 unit
2.	Kendaraan roda 3	18 unit
3.	Sepeda sampah	2 unit
4.	Bin sampah	70 unit
5.	Dump truck	28 unit
6.	Arm roll truck	7 unit
7.	Pick up	2 unit
8.	Backhoe loader	1 unit
9.	Container sampah	28 unit
10.	Landasan container	18 unit
11.	Transfer depo	11 unit
12.	TPS permanen	74 unit
13.	Kantor sektor	8 unit

Sumber : Profil DLH Yogyakarta 2017

Pelayanan pengangkutan sampah tersebut belum menjangkau di tiap kecamatan, DLH mengalami kendala pengangkutan sampah di wilayah yang sulit di jangkau seperti kawasan kumuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub Pengurangan Sampah, Bapak Haryoko. Pada tanggal 20 September 2017 pukul 09.00. di kantor DLH Kota Yogyakarta:

“kendala terdapat di wilayah geografis yang sulit dijangkau seperti kawasan kumuh yang *notabene* nya di daerah bantaran sungai, biasanya mereka buang sampah dengan cara ditimbun, buang di sungai, dan ada juga yang mau naik ke atas untuk mengumpulkan di TPS. Kebanyakan yang tinggal

bukan orang asli Jogja melainkan hanya warga yang tinggal sekitaran setahun dua tahun kayak kontraktor-kontraktor”

Daerah yang termasuk bantaran sungai di Kota Yogyakarta salah satunya adalah Kecamatan Tegalpanggung yang dilalui Sungai Code. Kondisi pemukiman yang tidak terencana dan sangat padat, ditambah dengan kondisi jalan yang sempit dan memiliki topografi yang bervariasi sehingga sulit untuk dijangkau oleh pelayanan kebersihan dari DLH. Oleh karena itu warga di Kecamatan Tegalpanggung mengatasi secara mandiri untuk pengelolaan sampah yang dibina oleh Rumah Zakat dengan pendirian Bank Sampah, dan pelatihan-pelatihan seperti pembuatan kompos dan hidroponik. Dengan adanya kegiatan Bank Sampah diharapkan agar warga menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bank Sampah Tegalpanggung, Bapak Agus. Pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 10.00 di lingkungan rumah warga RT 09 Kecamatan Tegalpanggung, Yogyakarta :

“dengan kegiatan Bank Sampah itu kita menggalang suatu kumpulan dan menjadikan seorang warga yang bisa memilah sampah untuk di kumpulkan ke Bank Sampah Rumah Zakat. Intinya agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Bank Sampah dibuka seminggu dua kali, hari kamis dan minggu. Setiap sampah ada harganya seperti botol, kardus dll itu di tampung dulu nanti di catat dan di jual ke pengepul”

3.1.5 Responsivitas

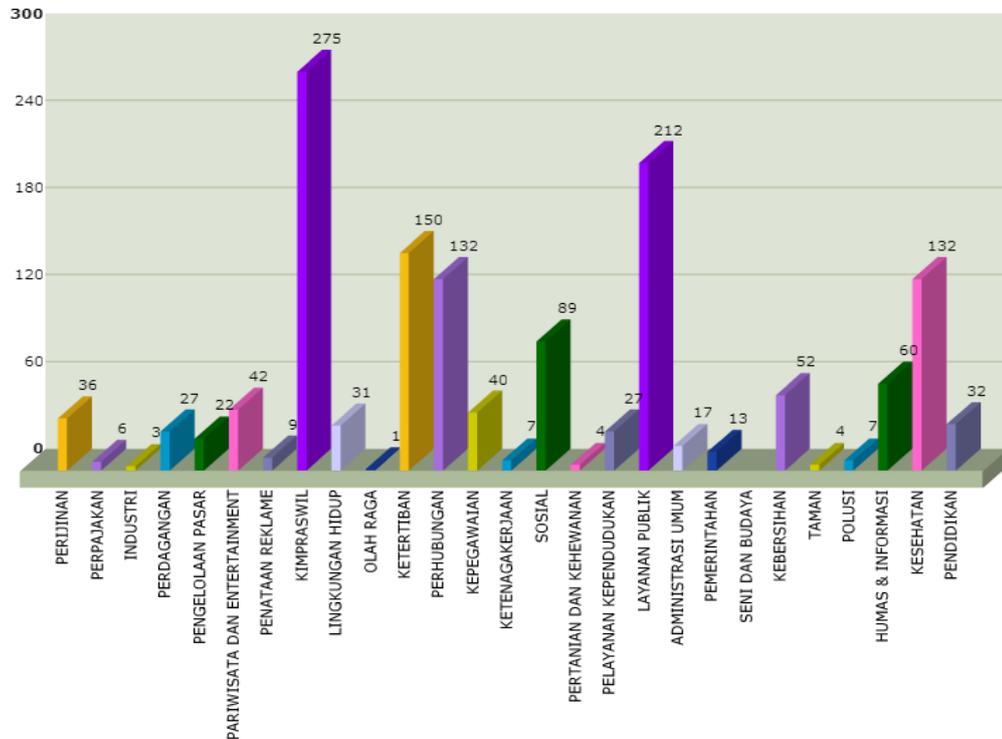
Responsivitas berkaitan dengan hasil kebijakan yang memuaskan masyarakat.

3.1.5.1 Keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah

Masyarakat dapat menyampaikan keluhan kepada DLH terkait pengelolaan sampah melalui Unit Layanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemerintah Kota Yogyakarta. UPIK merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, informasi, maupun usul/saran guna pengembangan pelayanan pemerintah dan Pembangunan Kota Yogyakarta salah satunya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Masyarakat dapat mengirimkan SMS ke 08122780001 atau dapat menghubungi melalui nomor telepon/fax (0274)561270, selain itu dapat mengirimkan e-mail ke upik@jogjakota.go.id atau datang ke Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Komplek Balai Kota, Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165.

Berdasarkan website UPIK yang diakses pada pukul 18.51 Tanggal 23 Oktober 2017 terdapat berbagai macam keluhan dari masyarakat misalnya pada tanggal 8 Juni tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pada pukul 07.00 pagi sampah masih berserakan di sepanjang Jalan A. Yani. Keluhan lainnya pada tanggal 27 Januari tahun 2015 terkait pengelolaan sampah misalnya truk bak sampah yang sudah beberapa hari tidak di angkut dengan berbagai macam alasan dari pemerintah hingga meminta uang tip pada masyarakat. Sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2016 ada 52 keluhan terkait kebersihan di Kota Yogyakarta :

Gambar 3.2
Jumlah Keluhan Pelayanan Kota Yogyakarta 2013-2016

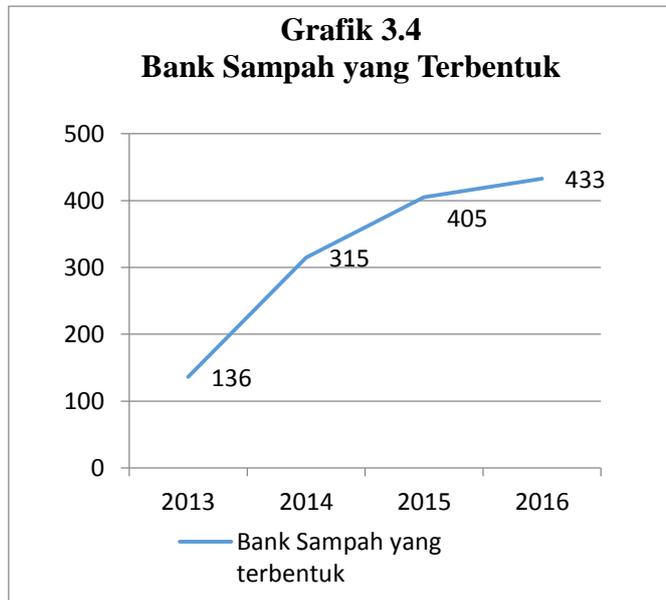


Sumber : Website UPIK Kota Yogyakarta

3.1.5.2 Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah hal ini sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 pasal 25 ayat 1. Pada tahun 2014 telah terbentuk 315 kelompok Bank Sampah dan Kelompok Pengelolaan Sampah Mandiri. Peningkatan ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat terutama pada tahun 2013 yang berjumlah 136 kelompok menjadi 315 pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 405 kelompok Bank Sampah dan Kelompok Pengolahan Sampah Mandiri, meningkat sebanyak 90 kelompok baru dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 433 kelompok Bank Sampah dan Kelompok Pengolahan Sampah



Sumber : Laporan Kinerja DLH tahun 2016

Mandiri, meningkat sebanyak 28 kelompok baru.

Dengan demikian dari seluruh 416 RW yang ada di Kota Yogyakarta, sebesar 71% telah memiliki kelompok Bank Sampah, meningkat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haryoko selaku Kepala sub Bagian Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2017, pukul 09.00 WIB di ruang Bidang Kebersihan :

“tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal. Contohnya Bank Sampah, peran serta masyarakat belum banyak. Pengelolaan sampah di kota hanya sekitar 10%. Misalnya jumlah sampah yang dihasilkan 100 ton, kemudian sampah yang dibuang ke TPA 90 ton. Jadi 10 ton dikelola bank sampah, paling tidak harusnya 20 atau 30 persen atau separuhnya bisa dikelola”

Tabel 3.8
Rincian Data Bank Sampah Tahun 2016

No	Kecamatan	Jml. RW yg ada Bank Sampah	Jml. Bank Sampah	Jml. Nasabah (KK)	Rata-rata Jml. Sampah terolah per bulan				
					Plastik (Kg)	Kertas (Kg)	Kaca (Kg)	Logam (Kg)	Lain2 (Kg)
1	Danurejan	28	31	1,01	710,50	1.909,50	325,00	462,00	45,00
2	Gondokusuman	44	46	2,277	2.004,48	4.723,54	874,33	764,96	0,00
3	Gondomanan	19	19	732	417,00	1.451,00	84,00	158,00	26,00
4	Jetis	26	28	1,683	1.138,81	3.114,14	355,45	474,53	0,00
5	Gedongtengen	13	13	625	609,00	1.269,00	175,00	325,00	46,00
6	Kotagede	25	34	1,683	425,00	1.555,00	156,00	173,00	0,00
7	Kraton	23	25	938	782,00	3.146,00	630,00	391,00	172,00
8	Mantrijeron	24	25	1,338	983,00	3.779,98	218,20	754,00	73,00
9	Mergangsan	40	40	1,896	1.598,00	5.402,00	464,00	829,00	19,00
10	Ngampilan	12	15	950	1.068,24	2.531,50	584,74	488,50	55,00
11	Pakualaman	16	16	393	286,00	971,00	104,00	215,00	4,00
12	Tegalrejo	32	36	1,418	1.032,19	2.325,17	315,80	357,23	0,00
13	Umbulharjo	66	77	2,91	1.221,00	8.395,00	1.307,00	1.349,00	0,00
14	Wirobrajan	24	28	1,002	1.381,19	3.227,89	541,60	470,67	0,00
TOTAL		392	433	18,855	13.656,41	43.800,72	6.135,12	7.211,89	440,00

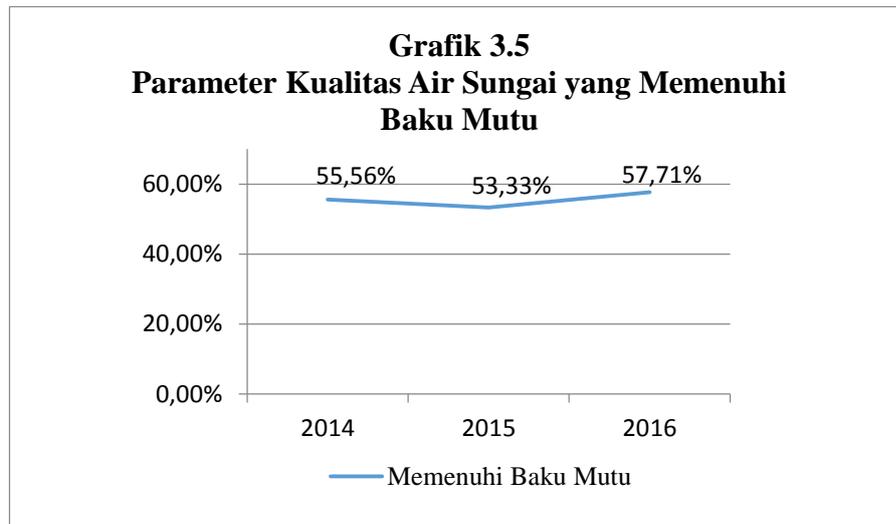
Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Nasabah paling banyak terdapat pada Kecamatan Mergangsan berjumlah 1,896 KK yang berpartisipasi pada bank sampah. Kecamatan yang jumlah nasabahnya sedikit terdapat di Kecamatan Pakualaman yang berjumlah 393 KK. Sampah yang paling banyak dikelola di Kota Yogyakarta adalah sampah kertas dengan total 43,800,72 kg/hari sedangkan jenis sampah yang paling sedikit diolah adalah sampah kaca berjumlah 6.135.12 kg/hari.

Pada tahun 2016 jumlah KK di Kota Yogyakarta adalah 131.092 KK, sedangkan jumlah KK yang menjadi nasabah bank sampah hanya 18.855 KK. Artinya hanya 14,38% KK yang menjadi nasabah bank sampah di Kota Yogyakarta hal tersebut menunjukkan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup selalu mengadakan sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurangi volume sampah. DLH Kota Yogyakarta memiliki agenda rutin untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti sosialisasi reguler yang diadakan setahun sekali. Selain itu DLH melakukan sosialisasi jika ada permintaan dari masyarakat diluar jadwal reguler tersebut.

3.1.6 Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan tujuan dari kebijakan berguna dan bernilai bagi masyarakat. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kualitas lingkungan, terutama kualitas air sungai di Kota Yogyakarta yang sering dijadikan tempat membuang sampah warga dibantaran sungai. presentase kualitas air sungai diukur dengan cara pemeriksaan laboratorium terhadap enam parameter yang dianggap paling menentukan kualitas air sungai, yaitu : BOD, COD, DO, Ph., Nitrat dan Nitrit, masing-masing pada lima lokasi pengambilan sampel pada 3 sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu sungai Code, Winongo Dan Gajahwong. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Januari, Agustus dan Desember.



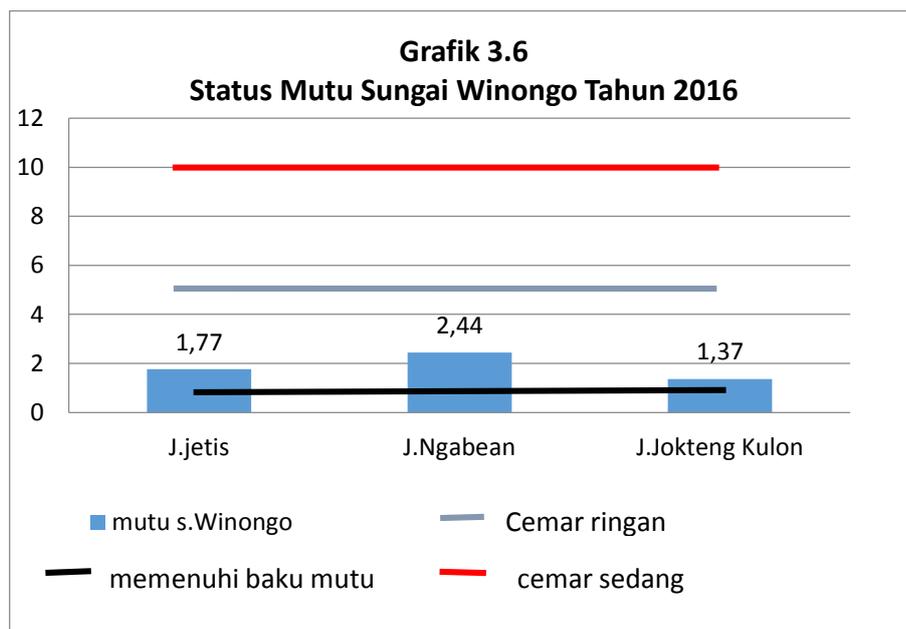
Sumber : Laporan Kinerja DLH Tahun 2016

Pada tahun 2014 ada sebanyak 135 sampel yang diuji dan hasilnya ada sebanyak 75 sampel yang memenuhi baku mutu (55,56%) sedangkan pada tahun 2015 menurun sebanyak 72 (53,33%) sampel yang memenuhi baku mutu. Pada tahun 2016 sampel yang diukur sebanyak 227 sampel dan yang memenuhi baku mutu sebanyak 131 (57,71%). Hasil analisis dilakukan DLH pada tahun 2016 yang terdapat dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.6.1 Sungai Winongo

Sesuai dengan perhitungan menggunakan Indeks Pencemaran hasil pemantauan oleh DLH di setiap penggal Sungai Winongo berkisar 1,37-2,44, nilai ini termasuk dalam kategori cemar ringan. Nilai tertinggi terdapat di titik pemantauan J. Ngabean (2,44), nilai ini menunjukkan bahwa kondisi sungai telah tercemar oleh limbah domestik yang berasal dari pemukiman dan nilai terkecil di

J.Jetis (1,77). Kondisi ini menunjukkan bahwa sungai ini telah mengalami *self purifikasi* dengan adanya turbulensi aliran air sehingga dapat menurunkan indeks pencemaran. Variasi nilai indeks pencemaran sebagai mana yang terlihat pada grafik dibawah ini :

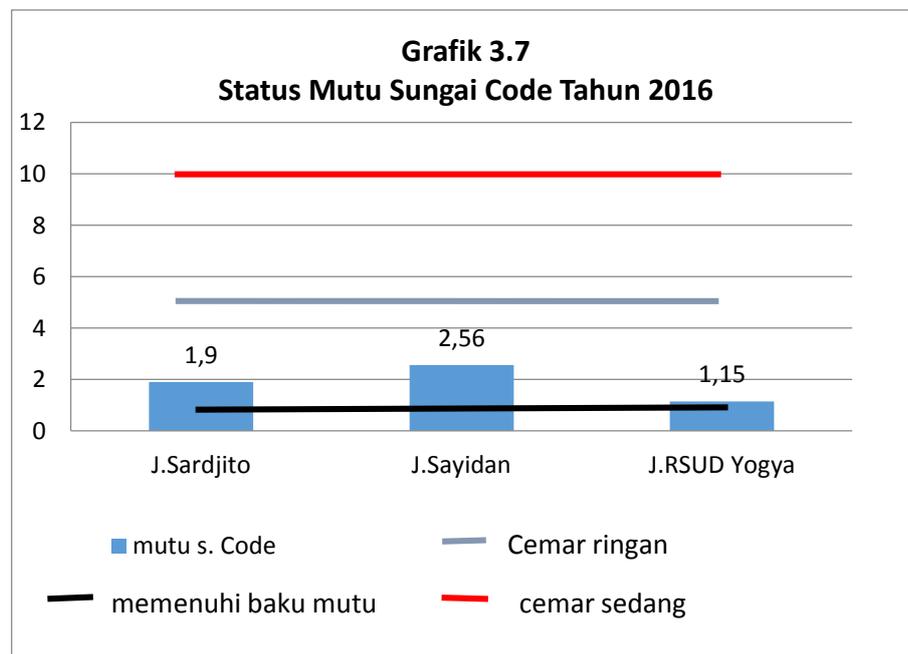


Sumber : SLHD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Lokasi titik pantau di Sungai Winongo ini ditetapkan sungai kelas II dimana sesuai peraturan peruntukannya untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, air untuk mengairi tanaman dan kegunaan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Status mutu dari lokasi pemantauan termasuk kategori cemar ringan, beberapa parameter yang memberi kontribusi adalah adanya bakteri Coliform total dan Coli tinja.

3.1.6.2 Sungai Code

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Indeks pencemaran hasil pemantauan oleh DLH di setiap penggal Sungai Code berkisar 1,15-2,56, nilai ini termasuk dalam kategori cemar ringan. Nilai tertinggi terdapat di titik pemantauan J.Sayidan (2,56) dan nilai terkecil do J.RSUD Yogya (1,15) sebagai mana yang terlihat pada grafik dibawah ini. Variasi indeks pencemaran Sungai Code tidak jauh berbeda dengan Sungai Winongo, pada nilai indeks pencemaran tertinggi disebabkan aliran sungai melewati daerah permukiman dan seiring adanya turbulensi aliran menyebabkan penambahan oksigen sehingga menurunkan nilai indeks pencemaran.

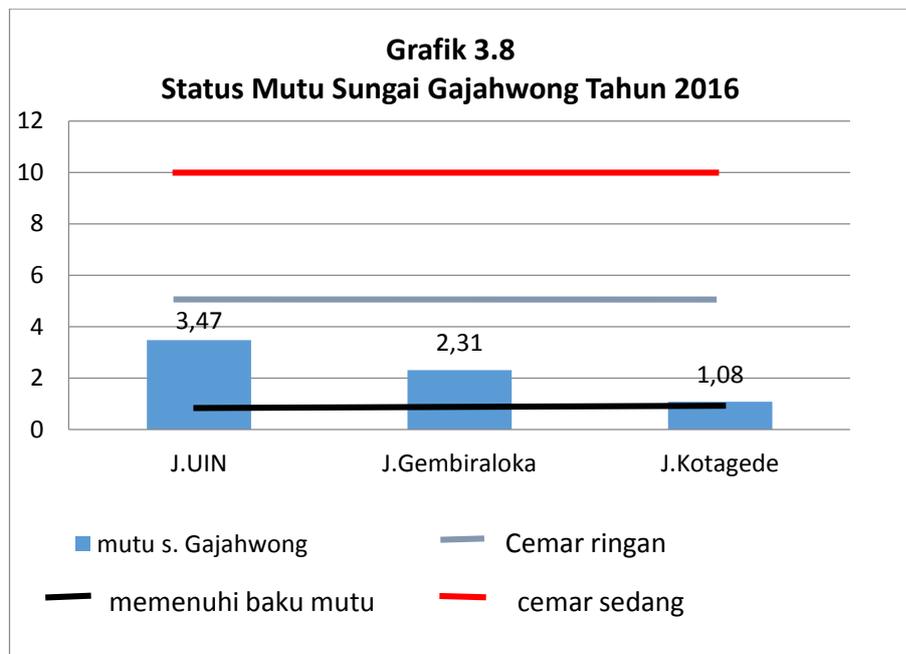


Sumber : SLHD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Lokasi titik pantau di Sungai Code ditetapkan sebagai sungai kelas II dimana sesuai peraturan peruntukannya untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, air untuk mengairi pertanian dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Status mutu dari lokasi pemantauan termasuk cemar ringan, beberapa parameter yang memberi kontribusi adalah adanya bakteri Coliform dan Coli tinja.

3.1.6.3 Sungai Gajahwong

Sesuai dengan perhitungan menggunakan Indeks Pencemaran hasil pemantauan oleh DLH di setiap penggal Sungai Gajahwong berkisar 1,08-3,47, nilai ini termasuk kategori cemar ringan. Nilai tertinggi dijumpai pada titik pemantauan J.UIN (3,47) dan nilai terkecil di J.Kotagede (1,08) sebagai mana yang terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : SLHD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Nilai indeks pencemaran Sungai Gajahwong memiliki ciri yang sama dengan Sungai Code dan Sungai Winongo. Pada umumnya sungai yang melewati Kota Yogyakarta menjadi saluran pembuangan limbah domestik, hal inilah yang menyebabkan air permukaan mengalami tekanan sehingga menyebabkan status air permukaan mejadi tercemar ringan. Lokasi titik pantau di Sungai Gajahwong ditetapkan sebagai sungai kelas II dimana sesuai peruntukannya sama dengan Sungai Code dan Sungai Winongo.